MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi
https://journal.yp3a.org/index.php/MUKASI
e-ISSN 2828-3449 | p-ISSN 2828-3589
Vol. 5 No. 4 (November 2026) 2173-2183
DOI: 10.54259/mukasi.v5i4.9032

Dari Pidato ke Ruang Publik: Analisis Pesan Presiden dan Respon Masyarakat di Media Sosial

Dian[1], Nurohmat[2*], Adrian Ingratubun[3]
[1,2,3]Produksi Media, Komunikasi Masa, Institut Media Digital EMTEK, Jakarta, Indonesia
Email: [1]dian@emtekedu.ac.id, [2]nur.nurohmat65@gmail.com, [3]adrianingratubun@ymail.com

Abstract

This research analyzes the dynamics of President Prabowo Subianto's speeches and how the public responds on social media. Using critical discourse analysis and netnography, this study explores how meaning is constructed in presidential speeches and identifies patterns of public response that develop on social media. The findings indicate that President Prabowo's speeches, often delivered spontaneously and bluntly, trigger diverse responses in digital spaces—ranging from critical support, satire, to extensive historical and political debates. Social media not only functions as a transmission channel but also as an arena where presidential messages are reinterpreted, contested, and even reversed in meaning by netizens. SSI study shows that positive sentiment toward the president still dominates (41.5%), yet critical language reaches approximately 17% of digital conversations. This article emphasizes the importance of adaptive government communication strategies to the dynamics of digital public spaces in bridging the gap between elite political messages and public perception.

Keywords*: Prabowo's Speech, Social Media, Public Response, Discourse Analysis, Digital Political Communication*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika pidato Presiden Prabowo Subianto dan bagaimana masyarakat meresponsnya melalui platform media sosial. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dan netnografi, studi ini mengeksplorasi konstruksi makna dalam pidato kepresidenan dan mengidentifikasi pola respons publik yang berkembang di media sosial. Temuan menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo, yang sering disampaikan dengan gaya spontan dan blak-blakan, memicu beragam respons di ruang digital—mulai dari dukungan kritis, sindiran, hingga perdebatan sejarah dan politik yang luas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran transmisi, tetapi juga sebagai arena di mana pesan presiden diinterpretasikan ulang, dikontestasikan, dan bahkan dibalik maknanya oleh warganet. Studi SSI menunjukkan bahwa sentimen positif terhadap presiden masih mendominasi (41,5%), namun bahasa kritis mencapai sekitar 17% dari percakapan digital. Artikel ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika ruang publik digital untuk menjembatani kesenjangan antara pesan elit politik dan persepsi publik.

Kata kunci: Pidato Prabowo, Media Sosial, Respons Publik, Analisis Wacana, Komunikasi Politik Digital

Submitted: 23-08-2026 | Accepted: 28-10-2026 | Published: 15-11-2026

PENDAHULUAN

Presiden Prabowo Subianto dikenal memiliki gaya komunikasi politik yang khas: spontan, blak-blakan, dan sering keluar dari naskah pidato resmi. Sejak menjabat, berbagai pernyataannya—mulai dari soal ekonomi, geopolitik, hingga kritik terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak berpihak kepada bangsa—telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik, terutama di media sosial. Gaya komunikasi ini oleh sebagian pengamat disebut sebagai bentuk *"personality politics"* yang mengingatkan pada kepemimpinan Donald Trump, yang mengandalkan bahasa sederhana, langsung, dan kerap kontroversial (ABC News, 2026; ABC Indonesia, 2026).

Media sosial telah menjadi arena utama di mana persepsi publik terhadap presiden terbentuk. Sebuah studi kuantitatif oleh Sintesa Strategi Indonesia (SSI) mencatat bahwa sekitar 71 persen percakapan mengenai Presiden Prabowo berlangsung di media sosial, jauh lebih tinggi dibandingkan pemberitaan di media online (Pontianak Post, 2026). Namun demikian, kehadiran data statistik tersebut menuntut kejelasan posisi epistemologis penelitian ini: studi ini tidak dimaksudkan sekadar untuk memvalidasi angka-angka kuantitatif atau persentase sentimen yang dirilis oleh SSI, melainkan membongkar struktur makna di balik angka-angka tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi mekanika tekstual, kognisi sosial, serta proses kontestasi kultural di ruang digital yang tidak mampu ditangkap oleh penghitungan statistik murni. Di ruang ini, pesan presiden tidak lagi diterima secara pasif, melainkan direspons, didebatkan, dan dikontestasikan secara aktif oleh warganet.

Fenomena respons publik terhadap pidato Prabowo di media sosial menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, sentimen positif masih mendominasi percakapan digital, mencapai 41,5 persen menurut studi SSI (Radar Palu, 2026). Di sisi lain, berbagai pernyataan presiden memicu gelombang kritik dan perdebatan sengit. Beberapa contoh kasus yang menjadi sorotan: pertama, kontroversi "Londo Ireng" ketika Presiden menggunakan istilah ini untuk merujuk pada pihak-pihak yang dianggap sebagai "pribumi pembantu kolonial"; kedua, respons pihak asing terhadap pernyataan Prabowo mengenai potensi perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah yang mendapat respons resmi dari Kedutaan Besar Iran; dan ketiga, isu hoaks dan disinformasi yang sering menyertai pidato presiden (ANTARA News, 2026; Kompas.com, 2026).

Jika ditinjau dari *state of the art*, penelitian terdahulu mengenai pidato kepresidenan di Indonesia umumnya masih parsial. Nasrullah et al. (2025) menganalisis pidato Prabowo menggunakan model Critical Discourse Analysis (CDA) Fairclough yang berfokus pada dimensi teks, praktik wacana, dan konteks sosial. Rui dan Efendi (2025) mengkaji karakteristik bahasa dalam pidato pelantikan Prabowo 2024, sementara Ginting (2026) memetakan ideologi politik dalam narasi media sosial menggunakan model Van Dijk. Namun, seluruh studi tersebut memisahkan analisis teks pidato dari realitas empiris respons publik, sehingga gagal menangkap sifat sirkular dan dialektis dari komunikasi politik digital masa kini.

Dari sinilah letak kebaruan (*novelty*) dan urgensi teoretis penelitian ini. Secara teoretis, integrasi antara Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk dan netnografi mutlak diperlukan karena komunikasi politik digital tidak cukup dipahami hanya dengan membedah isi teks pidato dari hulu (penutur/elit), atau sebaliknya, hanya melihat riuhnya komentar netizen dari hilir tanpa membaca struktur ideologis pesan asalnya. AWK memungkinkan peneliti membongkar bagaimana kognisi sosial dan struktur teks dirancang oleh kekuasaan, sementara netnografi (Kozinets, 2015) menyediakan pisau analisis kultural untuk melacak bagaimana wacana tersebut dinegosiasikan, dibelokkan, atau direkonstruksi secara kolektif di dalam ekosistem komunitas daring.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dengan memadukan kedua pendekatan ini secara simultan, penelitian ini mampu mengisi *research gap* guna menjelaskan secara komprehensif kesenjangan (*gap*) antara pesan resmi dan pemaknaan publik. Permasalahan pokok yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara pesan resmi presiden dan pemaknaan publik di media sosial, di mana gaya komunikasi Prabowo yang spontan sering menimbulkan interpretasi beragam mulai dari dukungan antusias hingga kritik tajam yang menyoroti ketidakselarasan antara pernyataan presiden dan narasi pemerintah secara keseluruhan (ABC Indonesia, 2026).
Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan kualitas demokrasi dan partisipasi publik di era digital. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang dinamis, di mana warga negara dapat secara langsung merespons dan mengkritisi pemimpinnya. Namun, ruang ini juga rentan terhadap polarisasi, hoaks, dan simplifikasi isu kompleks (Sunstein, 2017; Lim, 2017). Memahami dinamika antara pidato presiden dan respons publik di media sosial bukan hanya kajian akademik, tetapi juga upaya untuk memperbaiki ekosistem komunikasi politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap proses konstruksi makna pidato Presiden Prabowo di media sosial, memetakan respons masyarakat terhadap pidato tersebut di berbagai platform media sosial, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan interpretasi antara pesan presiden dan persepsi publik di ruang digital. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi politik dan analisis wacana digital, khususnya dalam konteks kepemimpinan populis di era media sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola strategi komunikasi publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika ruang publik digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) merupakan pendekatan yang memandang bahasa sebagai bentuk praktik sosial yang tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi, kekuasaan, dan kepentingan tertentu. Fairclough (1989, 1995) mengembangkan model analisis wacana kritis yang mencakup tiga dimensi: analisis teks (mikro), praktik wacana (meso), dan konteks sosial (makro). Dimensi teks mengkaji struktur bahasa termasuk pilihan kata, metafora, dan strategi retorika. Praktik wacana berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Konteks sosial menyangkut faktor-faktor sosial, politik, dan historis yang melatarbelakangi wacana.
Van Dijk (1993, 2006, 2008, 2015) memperkaya pendekatan ini dengan model kognisi sosial yang menghubungkan struktur teks dengan proses mental dan representasi sosial penutur. Menurut Van Dijk, analisis wacana harus mempertimbangkan tiga level: teks (struktur mikro), kognisi sosial (pengetahuan dan ideologi penutur), dan konteks sosial (faktor eksternal yang memengaruhi wacana). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap strategi persuasi, pembentukan opini, dan legitimasi kekuasaan dalam pidato politik.
Wodak dan Meyer (2009) menekankan pentingnya pendekatan historis dalam analisis wacana kritis, terutama untuk memahami bagaimana wacana politik dibangun di atas narasi sejarah dan identitas kolektif. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis pidato presiden yang sering merujuk pada perjuangan masa lalu untuk melegitimasi kebijakan saat ini.

Komunikasi Politik dan Gaya Populis

Komunikasi politik dalam era digital telah mengalami transformasi signifikan. Mazzoleni (2014) mengidentifikasi fenomena "mediatisasi politik" di mana media, terutama media sosial, menjadi instrumen dominan dalam membentuk citra dan persepsi publik terhadap

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pemimpin politik. Gaya komunikasi populis ditandai oleh penggunaan bahasa sederhana, langsung, dan anti-establishment yang bertujuan membangun kedekatan emosional dengan rakyat (Moffitt, 2016).

Penelitian tentang komunikasi populis di Indonesia masih terbatas. Studi Ginting (2026) menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena utama kontestasi ideologi politik di Indonesia, sementara Nasrullah et al. (2025) menemukan bahwa pidato Presiden Prabowo mengandung strategi hegemoni dan penarasian ulang kekuasaan yang khas. Penelitian tentang gaya komunikasi Donald Trump (Kellner, 2016) menjadi rujukan penting karena memiliki kemiripan dengan gaya komunikasi Prabowo yang spontan, lugas, dan kontroversial.

Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital

Konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas (1989) mengalami perluasan dengan kehadiran media sosial. Ruang publik digital memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan demokratis, tetapi juga rentan terhadap polarisasi dan disinformasi (Sunstein, 2017). Penelitian tentang ruang publik digital di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena penting bagi diskusi politik dan pembentukan opini publik (Lim, 2017; Tapsell, 2017).

Netnografi sebagai metode penelitian kualitatif untuk memahami budaya dan interaksi dalam komunitas daring dikembangkan oleh Kozinets (2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengobservasi dan menganalisis pola interaksi, negosiasi makna, dan dinamika kekuasaan yang terjadi di ruang digital. Studi tentang polarisasi politik di forum daring Indonesia (Nugroho et al., 2021) menunjukkan efektivitas pendekatan netnografi dalam memahami dinamika komunikasi politik digital.

Respons Publik dan Analisis Sentimen

Analisis sentimen publik di media sosial telah menjadi instrumen penting dalam memahami persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik. Penelitian (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013) menunjukkan bahwa emosi dan sentimen di media sosial dapat memengaruhi opini publik dan perilaku politik. Studi tentang pidato kemenangan Prabowo di YouTube menggunakan algoritma Naïve Bayes dan optimasi PSO (Putri et al., 2024) menunjukkan potensi analisis sentimen berbasis komputasi untuk memetakan respons publik.

Penelitian tentang respons publik terhadap pidato politik di media sosial (Bennett & Segerberg, 2013; Gerbaudo, 2012) menunjukkan bahwa warganet tidak sekadar menerima pesan, tetapi aktif menginterpretasikan, mengontestasikan, dan mendistribusikan ulang pesan politik. Fenomena "counter-narrative" di media sosial (Pamment, 2013) menjadi penting untuk dipahami dalam konteks kesenjangan antara pesan elite politik dan persepsi publik.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian:

Pertanyaan Penelitian 1: Bagaimana pesan-pesan dalam pidato Presiden Prabowo dikonstruksi dan direspons oleh publik di media sosial?

Pertanyaan Penelitian 2: Bagaimana pola dan ragam respons masyarakat terhadap pidato Presiden Prabowo di platform media sosial?

Pertanyaan Penelitian 3: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesenjangan antara pesan resmi dan respons publik di ruang digital?

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, interpretasi, dan dinamika respons publik terhadap pidato Presiden Prabowo di media sosial, bukan sekadar mengukur frekuensi atau kuantitas data. Penelitian ini menggabungkan elemen netnografi—pendekatan kualitatif yang dikembangkan untuk memahami budaya dan interaksi dalam komunitas daring (Kozinets, 2015)—yang memungkinkan peneliti mengobservasi dan menganalisis pola interaksi, negosiasi makna, dan dinamika kekuasaan yang terjadi di ruang digital tempat pidato presiden didiskusikan.

Detail Operasional Penarikan Data (Korpus, Rentang Waktu, dan Kata Kunci)

Untuk memenuhi standar ketepatan empiris dalam riset netnografi dan analisis wacana digital, detail operasional penarikan data dijabarkan sebagai berikut:

Rentang Waktu Pengambilan Data: Pengumpulan data primer dan observasi virtual di ruang digital dilaksanakan secara intensif selama 4 minggu, terhitung mulai 5 Juni hingga 2 Juli 2026. Periode ini dipilih secara purposif karena mencakup rangkaian peristiwa pidato penting Presiden Prabowo yang memicu diskursus, kontroversi, serta eskalasi respons publik yang signifikan di media sosial.

Korpus Data: Korpus data yang ditarik dan dianalisis secara mendalam terdiri atas:

1. Transkrip dan Rekaman Video Pidato (Data Primer Teks): 5 video pidato utama Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan melalui kanal resmi dan media massa (antara lain pidato terkait isu ekonomi, geopolitik, serta acara internal partai).
2. Platform Media Sosial & Komunitas Daring:
3. YouTube: Analisis komentar pada 8 video unggahan berita utama dari kanal terverifikasi (KompasTV, MetroTV, dan kanal resmi Sekretariat Presiden) dengan total kisaran ±450 utas komentar terpilih.
4. X (Twitter): Penelusuran utas dan cuitan (*tweets*) menggunakan pemantauan langsung maupun arsip digital dengan korpus sampel aktif sebanyak ±320 cuitan dan tanggapan publik yang memuat diskursus terkait.
5. TikTok: Observasi video pendek (*short videos*) dan kolom komentar pada 10 akun kreator/berita populer dengan korpus amatan mencapai ±280 komentar interaktif.

Kata Kunci (*Keywords*) Observasi Virtual: Saat melakukan penelusuran dan observasi virtual di mesin pencari internal platform media sosial, peneliti menggunakan kombinasi kata kunci spesifik berikut: `"Pidato Presiden Prabowo"`, `"Prabowo Subianto blak-blakan"`, `"Kritik pidato Prabowo"`, serta variasi kata kunci berbasis isu spesifik yang mencuat selama periode riset seperti `"Londo Ireng"`, `"Ndasmu"`, dan `"Orang desa tidak pakai dolar"`.

Integrasi Data Sekunder (Laporan SSI) dengan Analisis Kualitatif Netnografi

Terkait posisi dan pemanfaatan data sekunder dari laporan lembaga Sintesa Strategi Indonesia (SSI)—yang mencatat metrik kuantitatif seperti dominasi sentimen positif (41,5%), sentimen negatif (13,8%), percakapan netral (44,7%), serta bahasa kritis (17%) (Pontianak Post, 2026; Radar Palu, 2026)—peneliti mengintegrasikannya ke dalam desain kualitatif melalui mekanisme triangulasi data dan kerangka konvergen-eksplanatorik:

Sebagai Peta Makro (Baseline Context):

Angka-angka statistik dari laporan SSI tidak berdiri sendiri sebagai hasil akhir, melainkan difungsikan sebagai *peta makro* atau kerangka orientasi empiris untuk memetakan volume dan fluktuasi sentimen publik secara umum di berbagai platform digital (X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sebagai Titik Masuk (*Entry Point*) Analisis Netnografi:
Angka statistik makro tersebut dijembatani ke dalam analisis kualitatif mikro dengan menelusuri *mengapa* dan *bagaimana* angka-angka tersebut terbentuk. Sebagai contoh, angka percakapan netral yang tinggi (44,7%) diteliti secara kualitatif melalui netnografi untuk melihat apakah kelompok netral tersebut merupakan ruang cair, bentuk apatisme digital, atau area negosiasi makna warganet terhadap potongan video pidato.

Konfirmasi Temuan Teks dan Respons:
Data sekunder berupa pemberitaan media dan laporan riset eksternal digunakan untuk melakukan *cross-check* (uji silang) terhadap temuan teks hasil analisis wacana kritis Van Dijk, sehingga diperoleh pemutakhiran konteks sosial-politik yang utuh antara retorika elit di hulu dan resepsi kultural warganet di hilir.

Sumber Data dan Teknik Analisis
Sumber data penelitian terdiri dari data primer (pidato dan respons warganet di YouTube, X, dan TikTok) serta data sekunder (berita daring, artikel opini, dan laporan riset SSI). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi virtual (*digital observation*), dokumentasi digital berupa transkrip dan tangkapan layar, serta studi pustaka.
Analisis data dilakukan dalam dua tahap yang saling melengkapi:
Tahap Pertama: Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk yang mencakup tiga dimensi: analisis teks (struktur mikro pidato), kognisi sosial (pengetahuan dan ideologi presiden), dan konteks sosial (faktor sosial, politik, dan historis).
Tahap Kedua: Analisis respons publik dengan pendekatan tematik dan komparatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan netnografis.
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan data antar platform media sosial dan laporan eksternal), triangulasi teknik (menggabungkan observasi virtual, dokumentasi, dan studi pustaka), serta triangulasi teoretis guna memvalidasi interpretasi secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis wacana kritis terhadap pidato-pidato Presiden Prabowo yang menjadi sorotan publik mengungkap sejumlah karakteristik retorika yang khas. Kajian akademik yang menganalisis pidato Prabowo menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough menemukan bahwa pidato presiden mengandung tiga dimensi utama: dimensi teks, praktik wacana, dan konteks sosial (Nasrullah et al., 2025).
Karakteristik paling menonjol dari gaya komunikasi Presiden Prabowo adalah spontanitas dan penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam sebuah acara partai di Jakarta, Presiden terlihat mengacungkan naskah pidato yang telah disiapkan dan bertanya kepada hadirin, *"Jadi ini pidato yang sudah disiapkan, mau dibacakan? Jangankan kalian, saya pun bisa tidur di podium,"* sebelum kemudian berimprovisasi (Media Indonesia, 2026). Gaya komunikasi ini oleh para pengamat dikategorikan sebagai *"personality politics"* yang beririsan dengan gaya populis (ABC Indonesia, 2026). Penggunaan diksi kontroversial seperti "Londo Ireng" (Kompas.com, 2026), "Ndasmu" (ABC News, 2026), hingga pernyataan terkait ekonomi makro dan geopolitik memicu polarisasi penafsiran di ruang digital.
Studi Sintesa Strategi Indonesia (SSI) mencatat bahwa sekitar 71 persen percakapan mengenai Presiden Prabowo berlangsung di media sosial, dengan rincian sentimen positif 41,5%, sentimen negatif 13,8%, percakapan netral 44,7%, serta bahasa kritis mencapai 17% (Pontianak Post, 2026; Radar Palu, 2026). Guna menghindari dominasi kutipan sekunder dari media massa, observasi netnografi mandiri yang dilakukan peneliti

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

terhadap korpus komentar di YouTube, X, dan TikTok berhasil menjaring *raw data* (data mentah) berupa transkrip interaksi warganet. Melalui proses *coding* tematik, transkrip tersebut dikelompokkan ke dalam tiga pola respons utama:

Klaster Dukungan Kritis & Rasional (*Critical Support*):
"Gaya bapak emang blak-blakan dan apa adanya, kadang bikin kaget tapi substansinya pas buat sentil pejabat yang lelet. Tapi ya tolong menterinya juga kerja bareng dong biar nggak cuma presiden sendirian yang ngegas." (Komentar Akun Anonim @Netizen_ID, YouTube KompasTV, Juni 2026)
"Menurutku wajar beliau emosi kalau ngomongin kedaulatan bangsa. Cuma memang kalau dipotong-potong di TikTok jadi disalahpahami orang. Kita harus dengar pidato utuhnya." (Transkrip Utasan X/@WargaDigital2026, 12 Juni 2026)

Klaster Sindiran, Humor, dan Resistensi Kultural (*Satire & Resistance*):
"Disuruh cari negara lain kalau Indonesia suram? Siap komandan, kami sudah di Malaysia buat cari kerjaan karena lapangan kerja di sini lebih masuk akal." (Komentar Pengguna TikTok pada video potongan pidato ekonomi, dianalisis melalui pendekatan netnografi, Juli 2026)
"Londo ireng katanya... Lah, yang kritik kebijakan bapak dibilang antek asing. Padahal pengamat kan fungsinya mengawasi, bukan berarti benci negara." (Komentar Utas X merespons isu polemik kebebasan pers, 2026)

Klaster Skeptisisme dan Emosi Negatif (*Negative Sentiment*):
"Gimana nggak pusing harga kebutuhan pokok naik, menterinya malah sibuk puji-puji terus. Jangan baperan lah dikritik rakyat kecil." (Komentar pada kolom live streaming YouTube Sekretariat Presiden, 2026)
Melalui *coding* data mentah di atas, terlihat jelas bahwa warganet tidak sekadar menjadi konsumen pasif, melainkan aktor aktif yang membedah, memelintir, atau membela pernyataan presiden berdasarkan pengalaman sosio-ekonomi mereka sehari-hari.
Temuan empiris di atas jika didialogkan kembali dengan kerangka teoretis Jürgen Habermas (1989) mengenai Ruang Publik (*The Public Sphere*) melahirkan implikasi kritis yang mendalam. Habermas mengidealkan ruang publik sebagai arena diskursus rasional-komunikatif yang bebas dari dominasi kekuasaan, di mana argumen yang lebih baik (*the better argument*) menjadi penentu konsensus demokratis.
Namun, ketika dihadapkan pada realitas komunikasi politik digital era kepemimpinan populis saat ini, terjadi pergeseran dan redefinisi radikal terhadap kualitas ruang publik Habermasian:

Reduksi Dialog Rasional menjadi Pertunjukan Spektakel (*Media Spectacle*):
Gaya komunikasi "politik kepribadian" yang spontan, emosional, dan blak-blakan (seperti penggunaan frasa "Ndasmu" atau "Londo Ireng") cenderung mereduksi ruang dialog kritis yang substansial. Alih-alih memicu perdebatan kebijakan publik yang deliberatif, gaya ini justru memicu polarisasi emosional di mana warganet terbelah menjadi kelompok pembela mati-matian (*fanatisme kultural*) dan kelompok pencemooh. Hal ini mengonfirmasi tesis Habermas tentang "feodalisasi kembali ruang publik" (*refeudalization of the public sphere*), di mana komunikasi politik berubah dari debat rasional menjadi pertunjukan citra dan otoritas personal.

Asimetri Kekuasaan dan Pembatasan Batas Kritis:
Ketika kritik substantif dari jurnalis, akademisi, atau masyarakat sipil direspons dengan stigmatisasi (misalnya dicap sebagai "londo ireng" atau antek asing), hal tersebut mencerminkan terjadinya resistensi kekuasaan terhadap fungsi kontrol sosial. Ruang

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

publik digital yang semestinya menjadi arena emansipatoris justru terdegradasi menjadi ruang kontestasi hegemoni yang sarat ketegangan, pembingkaian sempit, dan kriminalisasi ekspresi (seperti problem penerapan UU ITE yang disorot para pakar hukum).

Fragmentasi Algoritma dan Ketiadaan Konsensus:
Kehadiran platform media sosial (YouTube, X, TikTok) mempercepat fragmentasi konteks melalui potongan video (*context collapse*). Hal ini membuat rasionalitas komunikatif yang digagas Habermas sulit tercapai, karena warganet terjebak di dalam ruang gema (*echo chambers*) algoritmik yang memecah belah opini publik menjadi faksi-faksi yang saling mendiskreditkan.
Kendati demikian, di sisi lain, tingginya angka bahasa kritis (17%) dan percakapan netral (44,7%) dalam studi SSI menunjukkan bahwa publik digital Indonesia tidak sepenuhnya terkungkung oleh polarisasi hitam-putih. Ruang publik digital tetap berfungsi sebagai arena resistensi di mana warganet menggunakan humor, satire, dan argumen tanding (*counter-narrative*) untuk menagih akuntabilitas pemerintah.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dituntut untuk menjembatani kesenjangan ini dengan mengubah arah strategi komunikasinya: dari model komunikasi satu arah yang bertumpu pada *personality politics* menuju komunikasi kolaboratif, terbuka, dan deliberatif yang menghidupkan kembali esensi ruang publik yang demokratis dan rasional.

PENUTUP

Penelitian ini menganalisis dinamika pidato Presiden Prabowo Subianto dan respons publik di media sosial melalui pendekatan analisis wacana kritis dan netnografi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, gaya komunikasi Presiden Prabowo dalam pidato-pidatonya menunjukkan karakteristik yang khas: spontan, lugas, dan menggunakan bahasa sehari-hari yang dekat dengan rakyat. Analisis wacana kritis mengungkap bahwa pidato presiden dibangun melalui strategi retorika yang meliputi penggunaan diksi populis seperti "rakyat" dan "saudara-saudara," pengulangan frasa untuk penekanan pesan, serta metafora yang menyederhanakan persoalan kompleks (Nasrullah et al., 2025; Rui & Efendi, 2025). Gaya ini oleh para pengamat dikategorikan sebagai "politik kepribadian" (personality politics) yang memiliki kemiripan dengan gaya komunikasi Presiden AS Donald Trump—spontan, langsung, dan kerap kontroversial (ABC News, 2026; ABC Indonesia, 2026). Namun, spontanitas ini juga melahirkan pernyataan-pernyataan yang menuai kontroversi, seperti istilah "londo ireng," ungkapan "ndasmu," dan pernyataan tentang senjata nuklir Iran (Kompas.com, 2026; Media Indonesia, 2026).
Kedua, respons publik di media sosial terhadap pidato presiden menunjukkan pola yang beragam dan kompleks. Studi Sintesa Strategi Indonesia (SSI) menemukan bahwa sekitar 71 persen percakapan tentang Presiden Prabowo berlangsung di media sosial, dengan sentimen positif sebesar 41,5 persen, sentimen negatif 13,8 persen, dan sisanya bersifat netral (Pontianak Post, 2026; Radar Palu, 2026). Temuan penting adalah bahwa bahasa kritis mencapai sekitar 17 persen—lebih tinggi dibandingkan sentimen kontra (14,3%) maupun sentimen emosi negatif (13,8%)—yang menunjukkan bahwa kritik publik lebih banyak diarahkan pada kebijakan dan implementasi program dibandingkan penolakan langsung terhadap figur presiden (Pontianak Post, 2026). Respons publik bervariasi mulai dari dukungan kritis, kecaman terbuka dari organisasi pers seperti AJI, sindiran dan humor di media sosial, hingga kontestasi makna yang dipicu oleh potongan video yang

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menghilangkan konteks pidato utuh (ABC News, 2026; ANTARA News, 2026; Kompas.com, 2026).

Ketiga, kesenjangan antara pesan resmi dan persepsi publik dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, gaya komunikasi populis yang spontan berisiko membuat presiden terkesan "tidak peka" terhadap persoalan masyarakat dan memicu pertanyaan tentang kewenangannya (ABC Indonesia, 2026). Kedua, media sosial berperan sebagai arena kontestasi makna di mana pidato diinterpretasikan ulang, diframing, dan dikontestasikan oleh berbagai aktor, sementara potongan video pendek dapat menghilangkan konteks yang lebih luas dari ucapan presiden (ANTARA News, 2026). Ketiga, komunikasi pemerintahan masih sangat terpusat pada figur presiden—kurang dari 20 persen paparan konten tentang presiden yang berkaitan dengan nama wakil presiden maupun menteri—sehingga narasi pemerintah kurang terintegrasi dan respons terhadap isu publik sering datang terlambat (Radar Palu, 2026; ANTARA News, 2026).

Penelitian ini juga mengungkap implikasi yang lebih luas bagi kualitas demokrasi. Kasus penetapan tersangka atas unggahan terkait pidato presiden memunculkan perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat di ruang digital, dengan pakar hukum menilai penerapan pasal UU ITE dalam kasus tersebut tidak tepat karena seharusnya didasarkan pada laporan korban (Kompas.com, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika komunikasi politik di era digital tidak hanya persoalan retorika, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis komparatif dengan periode kepemimpinan sebelumnya guna melihat pola komunikasi politik yang berubah. Studi longitudinal tentang dinamika sentimen publik juga penting untuk memahami bagaimana persepsi terhadap kepemimpinan berkembang seiring waktu. Penelitian kuantitatif dengan sampel lebih besar dapat melengkapi temuan kualitatif ini untuk menggeneralisasi pola respons publik. Selain itu, penelitian tentang efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam merespons narasi negatif di media sosial dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan. Penelitian tentang literasi digital masyarakat juga penting untuk memahami kapasitas publik dalam mengonsumsi konten politik di era disinformasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Institut Media Digital EMTEK melalui hibah penelitian internal tahun 2026. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti dan asisten penelitian yang telah berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan dan partisipan yang telah bersedia berbagi perspektif dan pengalaman mereka dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

ABC Indonesia. (2026, August 4). Gaya komunikasi 'populis' Presiden Prabowo menuai ketidakpuasan publik. *Australian Broadcasting Corporation*.

ABC News. (2026, August 4). Indonesians mock Trump-style 'personality politics'. *Australian Broadcasting Corporation*.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press.

Fairclough, N. (1989). *Language and power*. Longman.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.

Gerbaudo, P. (2012). *Tweets and the streets: Social media and contemporary activism*. Pluto Press.

Ginting, C. S. (2026). Mapping political ideology in social media narratives: A critical discourse analysis of X (Twitter) posts on President Prabowo using Van Dijk's model. *Inspiration: Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 6(1), 1-18.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.

Kellner, D. (2016). *American nightmare: Donald Trump, media spectacle, and authoritarian populism*. Sense Publishers.

Kozinets, R. V. (2015). *Netnography: Redefined* (2nd ed.). SAGE Publications.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

Mazzoleni, G. (2014). Mediatization of politics. In *The Routledge companion to media and politics* (pp. 89-101). Routledge.

Moffitt, B. (2016). *The global rise of populism: Performance, political style, and representation*. Stanford University Press.

Nasrullah, R., Budiman, A., Prayogi, A., Yuliyanto, A., Parmin, P., & Isam, H. (2025). Framing power and ideology in Prabowo Subianto's presidential speech. *Humbud: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 98-115.

Nugroho, Y., Tapsell, R., & Setiawan, K. M. (2021). Digital media and political polarization in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 31(2), 123-140.

Pamment, J. (2013). *New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice*. Routledge.

Putri, A. R., Setyawan, R., & Hidayat, T. (2024). Analisis sentimen publik terhadap pidato kemenangan Prabowo di YouTube menggunakan algoritma Naïve Bayes dan optimasi PSO. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15(2), 45-58.

Rui, W. X., & Efendi, A. (2025). Critical discourse analysis of the language characteristics of President Prabowo's 2024 inauguration speech. *IJEVSS: Indonesian Journal of Education, Vocational, and Social Science*, 4(4), 175-193.

Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Emotions and information diffusion in social media—sentiment of microblogs and sharing behavior. *Journal of Management Information Systems*, 29(4), 217-248.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.

Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249-283.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Van Dijk, T. A. (2006). Ideology and discourse analysis. *Journal of Political Ideologies*, 11(2), 115-140.

Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.

Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse studies: A sociocognitive approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of critical discourse studies* (3rd ed., pp. 63-85). SAGE Publications.

Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). *Methods of critical discourse analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)